

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1. Deskripsi Perusahaan**

KPP Pratama merupakan unit dibawah KPP yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu mencapai visi dan misi DJP. KPP Pratama adalah salah satu bentuk dari modernisasi sistem KPP pada tahun 2002. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu unit kerja dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas segala hal teknis di bidang perpajakan, seperti merumuskan dan melaksanakan serta standarisasi (NN, 2016). KPP singkatan dari Kantor Pelayanan Pajak. KPP bertugas melayani kepada masyarakat sebagai wajib pajak perihal perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan meliputi membayar, memotong pajak dan terakhir pemungut pajak maka disebut sebagai Wajib Pajak. (Satriyo,2007)

Dahulu, sebelum ada teknologi, Wajib Pajak masih melaporkan pajak dengan datang ke KPP. Seiring berkembangnya teknologi maka pada tahun 2002, KPP melakukan modernisasi, dan membantuk tiga unit baru yaitu pertama KPP Wajib Pajak Besar atau disebut dengan LTO (*Large Tax Office*). LTO menangani Wajib Pajak besar dan mengadministrasikan jenis pajak PPh dan PPN. Unit kedua yaitu KPP Madya. atau disebut MTO (*Medium Tax Office*). KPP Madya biasa menangani Wajib Pajak dengan penghasilan cukup besar di wilayah kabupaten/kota. Unit terakhir yang dibentuk yaitu KPP Pratama atau diebut STO (*Small Tax Office*). KPP Pratama merupakan KPP terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga Unit baru tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi dari KPP pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Modernisasi yang dilakukan yaitu penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak (Satriyo, 2007)

KPP Pratama sebagai unit naungan DJP, KPP Pratama memiliki visi dan misi sama dengan DJP. Visi dari DJP Tahun 2020-2024 adalah menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan. Sejalan dengan itu, Misi DJP Tahun 2020-2024 yakni:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Setiap instansi atau perusahaan memiliki logo sebagai identitas untuk merepresentasikan perusahaan. DJP mempunyai logo yang menggambarkan secara visual identitas perusahaan. DJP juga sempat mengganti logo pada tahun 2019, agar merubah cara pandang masyarakat mengenai DJP menjadi sebuah institusi yang profesional, modern, dan bersahabat oleh masyarakat. Bentuk logo DJP saat ini terdiri beberapa ide, yaitu:

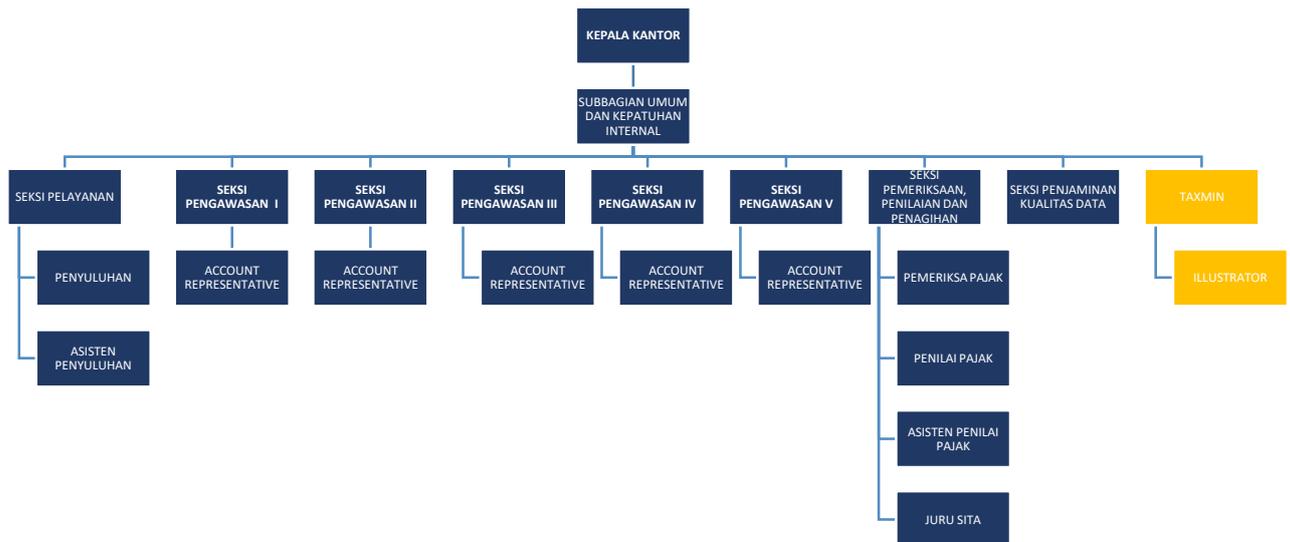
1. Simbol dari sinergi, jembatan juga kerja sama, dengan bentuk panah berulang   
berulang
2. Simbol dari lembaga, hukum aturan dan formalitas, dengan bentuk persegi , dan
3. Simbol dari mitra yang mendukung satu sama lain 



*Gambar 2.1 Logo DJP*  
(sumber: KPP Pratama Pondok Aren)

## 2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

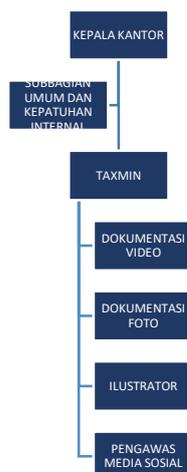
Berikut struktur Organisasi KPP Pratama Pondok Aren sejak tahun 2020, berdasarkan PMK-184/PMK.01/2020 oleh Direktorat Jenderal Pajak.



*Gambar 2.2 Bagan Organisasi KPP Pratama Pondok Aren*  
(sumber: KPP Pratama Pondok Aren)

berada dibawah naungan langsung Kepala Kantor dan juga Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (KASUKI) atau sama hal yaitu sejajar dengan divisi lain. Terlihat dalam tabel perusahaan umum, selain itu terdapat bagian inti dari Divisi *Taxmin*. *Taxmin* merupakan divisi di KPP Pratama Pondok Aren yang mengatur jejaring sosial dan kebutuhan internal terkait media yang membangun citra KPP dari sudut pandang masyarakat. *Taxmin* terbagi beberapa bagian, yaitu dokumentasi foto dan editing, dokumentasi video dan editing, ilustrasi, dan yang menanggapi komentar dan pertanyaan masyarakat di sosial media. Bagian dokumentasi dan editing baik foto maupun video, sesuai dengan nama bagiannya yaitu memegang peran dalam pengambilan sudut pandang saat mendokumentasikan kegiatan KPP, seperti sosialisasi, testimoni dan lainnya. Dokumentasi foto tidak akan mengerjakan dokumentasi video dalam satu kegiatan, begitu juga sebaliknya. Berikutnya bagian ilustrasi memiliki peran sebagai bagian yang menggambarkan informasi yang akan disampaikan menjadi lebih menarik. Terakhir bagian yang berperan sebagai Pengawas sosial media resmi KPP. Pegawai yang berada di divisi *Taxmin* harus memiliki kemampuan lebih dari satu, karena pegawai tidak memiliki satu bagian yang tetap. Contohnya, bagian dokumentasi foto terkadang memegang bagian dokumentasi foto, atau sebaliknya dengan dokumentasi video.

Berikut gambaran bagan inti divisi *Taxmin*.



Gambar 2.3 Bagan Inti Divisi *Taxmin*  
(sumber: KPP Pratama Pondok Aren)